

EVALUASI KINERJA KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) PENGELOLAAN SAMPAH DALAM RANGKA PENGUATAN EKONOMI SIRKULAR KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH

Bhimo Yonanda Putra
NPP. 32.0418

Asdaf Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Email: 32.0418@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Ridwan, SE., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Waste problems in Indonesia are increasingly complex along with population growth, including in Banyumas Regency which relies on Community Self-Help Groups (KSM) as the main actors in community-based waste management. **Purpose:** This study aims to evaluate the performance of KSM in waste management and formulate strategies to optimize their role in supporting the strengthening of the circular economy in Banyumas Regency. **Method:** The approach used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of in-depth interviews, field observations, documentation, and triangulation to test the validity of the data. The analysis was carried out using the performance evaluation theory of Payaman Simanjuntak and Robin which includes five dimensions: quantity, quality, cooperation, responsibility, and initiative. **Result:** The results of the study indicate that in general the performance of KSM is not optimal. Most KSMs are only able to manage 50%–70% of the target volume of waste, the quality of processed products is still low, coordination between stakeholders is not yet effective, activity reporting is minimal, and innovation is not evenly distributed. Recommendations submitted include improving management facilities, periodic technical training, preparing SOPs, establishing cross-stakeholder communication forums, strengthening reporting mechanisms, and holding innovation competitions. Active community involvement and incentives are also recommended to encourage participation and improve KSM performance. **Conclusion:** The results of this study are expected to be strategic input for local governments in strengthening the circular economy-based waste management system.

Keywords: Performance, Community Self-Help Groups, Evaluation, Economic Strengthening

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan sampah di Indonesia kian kompleks seiring pertumbuhan penduduk, termasuk di Kabupaten Banyumas yang mengandalkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai aktor utama dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja KSM dalam pengelolaan sampah serta merumuskan strategi optimalisasi peran mereka dalam mendukung penguatan ekonomi sirkular di Kabupaten Banyumas. **Metode:** Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, dan triangulasi untuk menguji keabsahan data. Analisis dilakukan menggunakan teori evaluasi kinerja Payaman Simanjuntak dan Robin yang mencakup lima dimensi: kuantitas, kualitas, kerja sama, tanggung jawab, dan inisiatif. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja KSM belum optimal. Sebagian besar KSM hanya mampu mengelola 50%–70% dari target volume sampah, kualitas produk olahan masih rendah, koordinasi antar pemangku kepentingan belum efektif,

pelaporan kegiatan minim, dan inovasi belum merata. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan sarana pengelolaan, pelatihan teknis berkala, penyusunan SOP, pembentukan forum komunikasi lintas-stakeholder, penguatan mekanisme pelaporan, serta penyelenggaraan kompetisi inovasi. Pelibatan aktif masyarakat dan pemberian insentif juga disarankan untuk mendorong partisipasi dan peningkatan kinerja KSM. **Kesimpulan:** Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.

Kata kunci: Kinerja, Kelompok Swadaya Masyarakat, Evaluasi, Penguatan Ekonomi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan sampah di Indonesia merupakan isu lingkungan yang kian mengkhawatirkan, terutama seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas konsumsi yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai. Menurut Hamdi (2014), kebijakan publik seharusnya mampu menjawab tantangan permasalahan masyarakat melalui perumusan masalah yang tepat, analisis yang sistematis, dan pelibatan partisipasi masyarakat. Menurut World Health Organization (WHO), “sampah dapat dikatakan sebagai barang atau benda yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang telah kehilangan nilai fungsinya karena tidak dipergunakan lagi untuk aktivitas manusia.” Secara fisik, sampah merupakan bahan yang terdiri atas residu kegiatan manusia yang tidak lagi memiliki nilai guna sehingga harus dikelola secara tepat untuk mencegah dampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023 mencatat bahwa total timbunan sampah nasional mencapai 31,9 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 35,67% atau sekitar 11,3 juta ton tidak terkelola dengan baik. Hal ini menunjukkan perlunya sistem pengelolaan sampah yang terdesentralisasi dan berbasis partisipasi masyarakat, terutama di daerah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi.

Kabupaten Banyumas, sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah, menghadapi tantangan serupa. Provinsi ini merupakan penyumbang timbunan sampah terbesar secara nasional dengan angka mencapai 5,76 juta ton atau sekitar 16,03% dari total timbunan sampah nasional (SIPSN, 2023). Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, timbunan sampah di daerah ini pada tahun 2023 mencapai 522.937 kg per hari yang dihasilkan dari 624.523 kepala keluarga, sementara volume sampah rumah tangga yang terangkut baru sekitar 22,72% per hari, lebih rendah dari rata-rata provinsi yang sebesar 26,94%.

Di tengah persoalan ini, peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) menjadi sangat strategis. KSM merupakan lembaga masyarakat desa atau kelurahan yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah termasuk pengumpulan, pemilahan, daur ulang, hingga pengolahan sampah. Menurut Aidha & Ayu (2022), peran KSM dalam pengelolaan sampah mencakup peningkatan partisipasi masyarakat, efisiensi pengelolaan di tingkat lokal, pengurangan dampak lingkungan, penciptaan lapangan kerja, dan penerapan pengelolaan yang berkelanjutan.

Konsep yang melandasi pendekatan ini adalah *circular economy* atau ekonomi sirkular, yang menurut Kumar *et al.* (2011), merupakan “pandangan baru yang secara konsep membantu organisasi dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan” melalui pemanfaatan kembali sumber daya, pengurangan limbah, dan efisiensi produksi. Dengan ekonomi sirkular, limbah tidak lagi dilihat sebagai akhir dari siklus, melainkan sebagai input untuk proses ekonomi selanjutnya. Hal ini sejalan dengan temuan Abou Taleb & Al Farooque

(2021), yang menekankan pentingnya pendekatan *full cost accounting* untuk mendorong efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan limbah kota berbasis ekonomi sirkular.

Namun demikian, implementasi ekonomi sirkular melalui peran KSM di Banyumas belum berjalan secara optimal. Berdasarkan laporan lapangan, masih terdapat berbagai kendala, seperti minimnya pelaporan kegiatan dan keuangan, tidak meratanya inovasi dalam pengolahan sampah, serta terbatasnya koordinasi lintas pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap kinerja KSM guna memperkuat kontribusi mereka dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mengevaluasi kinerja Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan sampah serta bagaimana upaya optimalisasi kinerja KSM dalam rangka penguatan ekonomi sirkular di Kabupaten Banyumas. Rumusan masalah tersebut lahir dari kebutuhan untuk memahami secara mendalam efektivitas peran KSM dalam mendukung sistem pengelolaan sampah berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pengelolaan sampah dan peran KSM dalam konteks yang beragam. Misalnya, penelitian oleh Aulia dkk. (2022) mengevaluasi pengelolaan sampah oleh KSM “Sae” di Kelurahan Purwokerto Wetan dengan fokus pada aspek kelembagaan, regulasi, pembiayaan, teknis operasional, dan partisipasi masyarakat. Namun, penelitian tersebut belum mengaitkan secara langsung peran KSM dalam kerangka ekonomi sirkular. Sementara itu, penelitian oleh Islami (2022) menelaah penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah pesisir, namun tidak secara khusus menyoroti peran kelembagaan KSM dalam proses tersebut.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) yang dapat diidentifikasi adalah belum adanya kajian evaluatif yang secara komprehensif menganalisis kinerja KSM berdasarkan dimensi kuantitas, kualitas, kerja sama, tanggung jawab, dan inisiatif, serta mengaitkannya secara langsung dengan penguatan ekonomi sirkular di tingkat lokal. Selain itu, belum ditemukan penelitian sebelumnya yang secara spesifik dilakukan di Kabupaten Banyumas dengan pendekatan yang menggabungkan aspek kelembagaan, teknis, sosial, dan kebijakan dalam pengelolaan sampah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Hal tersebut menjadi penting mengingat KSM di Kabupaten Banyumas memiliki peran signifikan sebagai pelaksana teknis pengelolaan sampah melalui skema Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan program-program pemerintah daerah seperti “Sampah Beruang” dan aplikasi “Salinmas”. Namun demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua KSM menjalankan pelaporan kegiatan dan keuangan secara transparan, serta belum seluruhnya menerapkan inovasi pengelolaan berbasis prinsip ekonomi sirkular. Ketidakesesuaian antara kebijakan, pelaksanaan, dan capaian tersebut menjadi indikator adanya kesenjangan yang perlu dikaji secara kritis.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan dalam literatur akademik dan memberikan kontribusi nyata terhadap perumusan kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat dan prinsip ekonomi sirkular yang berkelanjutan, khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengelolaan sampah dan peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti dengan pendekatan dan fokus yang berbeda-beda. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai pengelolaan sampah berbasis masyarakat, namun masih terdapat ruang

untuk eksplorasi lebih lanjut terutama dalam konteks evaluasi kinerja KSM yang dikaitkan secara langsung dengan penerapan ekonomi sirkular.

Penelitian oleh Auliadkk. (2022) mengevaluasi pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) KSM “Sae” di Kelurahan Purwokerto Wetan. Penelitian ini menyoroti lima aspek utama yaitu kelembagaan, regulasi, pembiayaan, teknis operasional, dan peran serta masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun aspek kelembagaan telah memenuhi sebagian besar indikator SNI 3242-2008, masih terdapat kekurangan dalam hal sumber daya manusia dan sosialisasi regulasi. Penelitian ini belum mengaitkan temuan dengan pendekatan ekonomi sirkular secara eksplisit.

Selanjutnya, penelitian oleh Aidha & Ayu (2022) mengkaji hubungan antara kinerja KSM dengan kepuasan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kinerja KSM dan kepuasan masyarakat. Meskipun fokus pada kinerja, penelitian ini tidak membahas aspek evaluatif secara multidimensional dan tidak menyinggung aspek ekonomi sirkular.

Putra dkk. (2022) dalam penelitiannya di Kabupaten Bengkulu Tengah mengangkat permasalahan belum teratasinya pengelolaan sampah secara komprehensif. Penelitian ini lebih menekankan pada peran serta masyarakat dan hambatan dalam pelaksanaan teknis, namun tidak secara spesifik mengevaluasi peran kelembagaan KSM secara mendalam.

Penelitian yang menyinggung ekonomi sirkular dilakukan oleh Islami (2022), yang menganalisis penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah pesisir di Pulau Pasaran, Bandar Lampung. Penelitian ini menekankan pentingnya integrasi sistem, kebijakan, dan dukungan stakeholder, namun tidak secara khusus mengevaluasi performa KSM dalam konteks tersebut.

Penelitian lainnya oleh Asrul dkk. (2022) berfokus pada penerapan ekonomi sirkular melalui pengelolaan sampah menjadi produk kreatif di Panti Asuhan Muhammadiyah Kabupaten Sorong. Penelitian ini menunjukkan potensi ekonomi sirkular dalam mendukung pemberdayaan sosial, tetapi lokus dan subjek penelitiannya berbeda, yakni bukan pada lembaga KSM sebagai entitas pelaksana utama.

Dari kelima penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa studi yang membahas pengelolaan sampah dan sebagian yang menyinggung ekonomi sirkular, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengevaluasi kinerja KSM berdasarkan dimensi evaluatif seperti kuantitas, kualitas, kerja sama, tanggung jawab, dan inisiatif dalam konteks penguatan ekonomi sirkular di Kabupaten Banyumas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan kajian yang mendasari urgensi penelitian ini untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan berorientasi pada keberlanjutan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang membedakannya dari sejumlah penelitian terdahulu yang membahas isu pengelolaan sampah dan peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Kebaruan tersebut terletak pada pendekatan evaluatif yang digunakan secara komprehensif dengan mengkaji lima dimensi kinerja KSM, yaitu kuantitas, kualitas, kerja sama, tanggung jawab, dan inisiatif, serta keterkaitannya dengan upaya penguatan *circular economy* atau ekonomi sirkular di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Banyumas. Pendekatan ini belum banyak dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Sebagai perbandingan, penelitian yang dilakukan oleh Aulia dkk. (2022) menyoroti aspek kelembagaan, regulasi, teknis operasional, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah oleh KSM, namun tidak menghubungkannya secara langsung dengan prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Sementara itu, penelitian oleh Islami (2022) memang membahas ekonomi

sirkular, namun konteks dan objeknya berbeda karena fokus pada kawasan pesisir dan tidak mengevaluasi performa kelembagaan seperti KSM.

Penelitian oleh Aidha & Ayu (2022) lebih berfokus pada hubungan antara kinerja KSM dengan kepuasan masyarakat, tanpa mengkaji secara mendalam dimensi evaluasi kinerja organisasi serta tanpa mengaitkannya dengan penguatan sistem ekonomi sirkular. Demikian pula, studi oleh Putra dkk. (2022) dan Asrul dkk. (2022) menekankan pada isu teknis pengelolaan sampah dan pemberdayaan sosial, namun tidak memberikan analisis evaluatif secara sistematis terhadap kinerja KSM dalam konteks pengelolaan berbasis keberlanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikatakan memiliki unsur kebaruan karena menggabungkan pendekatan evaluasi organisasi secara terstruktur dengan orientasi transformasional menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan melalui ekonomi sirkular.

Selain itu, penelitian ini secara spesifik dilakukan di Kabupaten Banyumas yang hingga saat ini belum banyak dikaji dalam konteks tersebut. Penelitian ini juga menyusun rekomendasi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada teknis pengelolaan, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, pengawasan, partisipasi masyarakat, serta insentif dalam mendukung efektivitas KSM sebagai aktor utama dalam tata kelola sampah daerah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam memperluas khazanah keilmuan dan praktik pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang adaptif terhadap prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Strategi serupa juga terbukti efektif dalam pengembangan kota berkelanjutan sebagaimana ditunjukkan oleh Andrade Guerra *et al.* (2016), melalui integrasi mobilitas dan pengelolaan lingkungan berbasis kolaborasi.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kinerja Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam kerangka penguatan ekonomi sirkular. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui serta memperoleh gambaran mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dalam mengoptimalkan kinerja KSM sebagai pelaksana teknis pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Dengan demikian, melalui hasil analisis yang komprehensif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat serta mendukung implementasi ekonomi sirkular di daerah. Sebagaimana dinyatakan oleh Hamid (2018), manajemen pemerintahan daerah dituntut untuk mampu memberdayakan potensi lokal dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam kinerja Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan sampah serta strategi optimalisasi perannya dalam penguatan ekonomi sirkular di Kabupaten Banyumas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data dari kondisi yang alamiah melalui interaksi langsung dengan informan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2019) bahwa pendekatan kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan secara holistik melalui deskripsi dalam konteks khusus secara mendalam. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap aktor-aktor kunci seperti pejabat Dinas Lingkungan Hidup, ketua dan anggota KSM, serta masyarakat; serta data sekunder yang berasal dari dokumen instansi, arsip kegiatan, dan literatur ilmiah. Menurut Nurdin & Hartati (2018), data primer dalam penelitian

sosial dapat diperoleh langsung dari subjek melalui wawancara, observasi, dan interaksi lapangan untuk memahami realitas sosial secara utuh.

Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling untuk informan utama yang memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian, dan accidental sampling untuk responden yang bersifat pelengkap. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, dengan teknik triangulasi sebagai metode pengujian keabsahan data. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dengan dibantu pedoman wawancara dan catatan lapangan. Simangunsong (2019) menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama karena keterlibatan langsungnya mempengaruhi proses pengumpulan dan interpretasi data. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara tematik.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 25 Januari 2025, berlokasi di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Lokasi penelitian meliputi beberapa kecamatan tempat beroperasinya KSM yang menjadi objek evaluasi. Dalam proses analisis, digunakan teori evaluasi kinerja Payaman Simanjuntak dan Robin yang terdiri atas lima dimensi utama: kuantitas, kualitas, kerja sama, tanggung jawab, dan inisiatif. Kelima dimensi tersebut menjadi acuan utama dalam mengevaluasi efektivitas kinerja KSM dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis ekonomi sirkular di tingkat lokal.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengacu pada teori evaluasi kinerja dari Payaman Simanjuntak dan Robin yang mencakup lima dimensi: kuantitas, kualitas, kerja sama, tanggung jawab, dan inisiatif. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kinerja Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan sampah sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi sirkular di Kabupaten Banyumas. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan pengelola KSM, yang kemudian dianalisis secara tematik untuk menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas peran KSM dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

3.1. Evaluasi Kinerja Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelolaan Sampah dalam Rangka Penguatan Ekonomi Sirkular Kabupaten Banyumas

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Kabupaten Banyumas merupakan solusi dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang telah berjalan, namun masih menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal. Oleh karena itu, evaluasi diperlukan untuk menilai kinerja KSM, mengukur ketercapaian tujuan, serta menilai dampaknya. Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi masukan bagi pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja KSM dalam pengelolaan sampah sebagai upaya penguatan ekonomi sirkular, dengan menggunakan lima dimensi evaluasi dari teori Payaman Simanjuntak dan Robin, yaitu kuantitas, kualitas, kerja sama, tanggung jawab, dan inisiatif.

a. Kuantitas

Dalam mengevaluasi kinerja KSM, dimensi kuantitas berfungsi untuk menilai sejauh mana volume sampah yang berhasil dikelola sesuai dengan target atau kapasitas yang telah ditentukan. Aspek ini mencerminkan produktivitas harian KSM, kecepatan kerja, serta kecukupan jumlah tenaga kerja dan alat yang tersedia untuk menyelesaikan beban kerja. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas tahun 2022, capaian persentase cakupan layanan persampahan dan jumlah sampah yang tertangani belum sepenuhnya mencapai target, menjadi indikator bahwa aspek kuantitas masih perlu diperbaiki.

Hasil wawancara dengan beberapa pihak menunjukkan ketimpangan performa antar-KSM. KSM Randu Makmur, misalnya, mampu mengolah 15 ton sampah per hari dengan sistem kerja yang tersistematis, dukungan alat, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Sebaliknya, KSM seperti Sejahtera di Purwokerto Utara hanya mampu menangani sekitar 40–50% dari total sampah di wilayahnya karena keterbatasan alat, tenaga kerja, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu, faktor musiman seperti musim hujan menyebabkan lonjakan volume sampah yang tidak semua KSM mampu atasi secara efisien.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa perbedaan kuantitas pengelolaan sangat dipengaruhi oleh faktor infrastruktur, kapasitas SDM, dan dukungan pemerintah. KSM yang memiliki fasilitas memadai dan dukungan kelembagaan cenderung lebih mampu mencapai target dibanding KSM yang beroperasi secara mandiri. Partisipasi masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi faktor kunci dalam menunjang kuantitas pengelolaan. Namun demikian, masih banyak KSM yang belum mampu memenuhi target harian akibat keterbatasan internal maupun eksternal.

Dampak dari rendahnya kuantitas pengelolaan mencakup penumpukan sampah di TPS, meningkatnya beban di TPA, serta berkurangnya efektivitas ekonomi sirkular karena minimnya hasil olahan yang bernilai ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan fasilitas, pelatihan SDM, penguatan kesadaran masyarakat, dan koordinasi lintas-KSM perlu dilakukan. Sesuai teori *Goal Setting* dari Locke & Latham, pencapaian target sangat bergantung pada kejelasan tujuan, komitmen, dan dukungan sistem. Dengan demikian, kuantitas pengelolaan oleh KSM di Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya efektif, meskipun beberapa unit telah menunjukkan capaian yang sesuai target.

b. Kualitas

Dimensi kualitas merujuk pada kemampuan KSM dalam menyelesaikan pengelolaan sampah secara efisien, akurat, dan sesuai dengan standar hasil yang ditetapkan. Aspek ini mencakup ketelitian kerja, penggunaan sarana dan prasarana yang memadai, serta efektivitas hasil olahan seperti kompos, RDF (*Refuse Derived Fuel*), dan maggot. Kualitas kerja juga dinilai dari kepatuhan terhadap prosedur, efisiensi waktu, serta kontribusi terhadap lingkungan dan kepuasan masyarakat.

Berdasarkan hasil lapangan, kualitas pengelolaan antar-KSM bervariasi. KSM Randu Makmur di Kecamatan Patikraja menjadi contoh keberhasilan, dengan produk olahan yang bernilai ekonomi tinggi dan proses kerja yang terstruktur, didukung pelatihan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta peralatan modern. Sebaliknya, KSM Bersih Mandiri dan Sejahtera menghadapi hambatan kualitas akibat keterbatasan teknis, metode manual, dan minimnya pelatihan, yang menyebabkan hasil olahan tidak memenuhi standar pasar.

Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas meliputi tersedianya teknologi, keterampilan teknis anggota, serta partisipasi masyarakat dalam memilah sampah dari rumah. KSM yang dilengkapi alat pemilah otomatis dan mendapatkan pelatihan cenderung menghasilkan produk berkualitas tinggi. Namun, keterbatasan armada pengangkut dan minimnya edukasi masyarakat masih menjadi kendala yang menghambat pencapaian kualitas optimal di beberapa wilayah operasional KSM.

Kualitas pengelolaan sampah yang baik memberikan dampak positif pada ekonomi sirkular, peningkatan pendapatan KSM, serta lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan berupa penguatan fasilitas, pelatihan berkelanjutan, serta penerapan SOP yang seragam di seluruh KSM. Mengacu pada prinsip *Total Quality Management* (TQM), kualitas bukan hanya hasil akhir, melainkan juga proses kerja yang konsisten dan budaya mutu di dalam organisasi. Evaluasi menunjukkan bahwa meskipun sebagian KSM telah menunjukkan capaian yang baik,

masih banyak yang perlu ditingkatkan agar kualitas pengelolaan lebih merata dan berkelanjutan.

c. Kerja Sama

Dimensi kerja sama dalam evaluasi kinerja KSM mencakup hubungan kolaboratif antaranggota KSM, serta koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga pendukung, dan masyarakat. Dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat, kerja sama menjadi elemen penting karena proses pengelolaan tidak dapat dilakukan secara individu. Kolaborasi yang efektif membutuhkan komunikasi terbuka, kepercayaan, pembagian peran yang jelas, dan orientasi pada tujuan bersama. KSM yang mampu membangun jejaring kerja yang sinergis lebih berpeluang mencapai efisiensi operasional dan hasil yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan perbedaan signifikan dalam praktik kerja sama antar-KSM. KSM Randu Makmur menunjukkan kerja sama yang optimal, baik dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), TPA BLE, maupun UPKP. KSM ini aktif menjalin koordinasi, menjadwalkan pelaporan rutin, dan bekerja sama dengan industri dalam penjualan produk daur ulang. Masyarakat sekitar juga terlibat aktif dalam memilah sampah dari rumah, sehingga mendukung kelancaran operasional KSM. Sementara itu, KSM Sokanegara juga menunjukkan kekompakan internal dengan semangat kekeluargaan dan evaluasi berkala untuk meningkatkan kinerja.

Sebaliknya, beberapa KSM seperti Sejahtera dan Bersih Mandiri menunjukkan lemahnya kerja sama baik secara internal maupun eksternal. Minimnya koordinasi dengan DLH dan pemerintah desa menyebabkan rendahnya transparansi pelaporan dan terbatasnya akses terhadap bantuan teknis atau fasilitas. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah memperberat beban kerja KSM. Ketiadaan forum komunikasi antar-KSM juga membuat potensi kolaborasi lintas kelompok tidak dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, jika KSM saling berbagi sumber daya seperti alat atau tenaga kerja, banyak kendala teknis dapat diatasi secara kolektif.

Untuk memperkuat kerja sama, perlu adanya pembentukan forum koordinasi antarkelompok, peningkatan kapasitas kepemimpinan KSM, dan pendampingan intensif dari DLH. Selain itu, penerapan regulasi seperti Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2023 dapat menjadi dasar penguatan hubungan antarstakeholder. Menurut teori *Interdependensi Sosial*, kerja sama yang efektif memerlukan ketergantungan positif dan komunikasi terbuka antar pihak. Jika KSM bekerja secara terpisah (silo), maka pengelolaan sampah tidak akan berjalan maksimal dan ekonomi sirkular pun sulit diwujudkan. Dengan membangun kolaborasi yang kuat, KSM diharapkan dapat meningkatkan dampak dan efektivitas pengelolaan sampah secara berkelanjutan di Kabupaten Banyumas.

d. Tanggung Jawab

Dimensi tanggung jawab dalam evaluasi kinerja KSM menilai sejauh mana anggota KSM menjalankan tugas sesuai peran yang ditetapkan dengan kesadaran, akuntabilitas, dan kedisiplinan. Tanggung jawab ini mencakup pelaksanaan operasional harian, pelaporan keuangan dan kinerja, serta kepatuhan terhadap regulasi, seperti Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2023. Indikator tanggung jawab juga mencakup kesadaran individu dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, pelaksanaan fungsi dengan profesional, serta kemampuan KSM merespons dan mengatasi tantangan lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSM seperti Randu Makmur dan Teluk menampilkan tingkat tanggung jawab yang tinggi. Mereka membagi tugas secara jelas, melaporkan kinerja dan keuangan secara rutin kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta menunjukkan kedisiplinan tinggi di lapangan. Anggota yang berhalangan hadir

digantikan secara bergilir, menunjukkan fleksibilitas dan rasa tanggung jawab kolektif. Sebaliknya, KSM seperti Sejahtera di Purwokerto Utara hampir tidak pernah melaporkan kinerjanya secara formal, meskipun memanfaatkan fasilitas publik. Hal ini menjadi masalah serius karena menyalahi ketentuan pelaporan dan mengindikasikan lemahnya akuntabilitas.

Dari total 60 KSM di Kabupaten Banyumas, hanya 32 KSM yang secara konsisten menyusun laporan pertanggungjawaban. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak KSM yang belum melaksanakan kewajiban administratif yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab kelembagaan. Selain itu, beberapa KSM mengalami penurunan disiplin operasional, seperti keterlambatan anggota, pelanggaran SOP, dan kurangnya pemeliharaan alat. Kualitas kepemimpinan dan minimnya pengawasan dari pemerintah daerah menjadi faktor yang memperlemah tanggung jawab KSM dalam mengelola sampah secara berkelanjutan.

Rendahnya tanggung jawab berdampak negatif terhadap efektivitas pengelolaan sampah dan kepercayaan publik. KSM yang lalai dalam pelaporan keuangan dan operasional berisiko merugikan daerah, mengurangi partisipasi masyarakat, dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Untuk mengatasinya, perlu penguatan sistem pengawasan, pelatihan nilai-nilai etika dan akuntabilitas, serta pemilihan pemimpin KSM yang berintegritas. Mengacu pada Teori Akuntabilitas Publik, lembaga berbasis masyarakat seperti KSM memiliki kewajiban moral dan administratif untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik secara transparan. Tanggung jawab yang kuat merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan mendukung ekonomi sirkular di Kabupaten Banyumas.

e. **Inisiatif**

Dimensi inisiatif mengukur sejauh mana KSM mampu secara proaktif mengembangkan ide, inovasi, dan pendekatan kreatif dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Inisiatif ini terlihat dari kemampuan menciptakan solusi baru atas tantangan lapangan, pengambilan keputusan yang inovatif, serta keterbukaan terhadap penggunaan teknologi dan metode modern. KSM Randu Makmur di Kecamatan Patikraja merupakan contoh KSM dengan tingkat inisiatif tinggi. Mereka berhasil mengembangkan budidaya maggot sebagai pakan ternak, memproduksi RDF (*Refuse Derived Fuel*) sebagai bahan bakar alternatif, serta memperluas jaringan pemasaran produk daur ulang dengan mitra industri dan UKM. Penerapan alat pemilah otomatis dan pemanfaatan teknologi pirolisis juga memperkuat efisiensi serta kualitas produk daur ulang mereka.

Sebaliknya, sejumlah KSM lain seperti Bersih Mandiri dan Sejahtera menunjukkan rendahnya inisiatif dalam mengelola tantangan yang ada. Mereka cenderung menjalankan aktivitas secara rutin tanpa inovasi, tidak memanfaatkan teknologi baru, dan kurang aktif mencari solusi atas keterbatasan fasilitas atau partisipasi masyarakat. Hal ini membuat efektivitas operasional menurun dan nilai ekonomi dari hasil olahan pun rendah. Rendahnya inisiatif tidak selalu disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, tetapi juga oleh kurangnya kepemimpinan yang mendorong kreativitas, rendahnya akses terhadap informasi dan pelatihan, serta minimnya kolaborasi dengan pihak luar seperti pemerintah atau sektor swasta.

Inisiatif yang tinggi memberikan dampak besar terhadap efisiensi kerja, penciptaan nilai tambah ekonomi, serta keberlanjutan program pengelolaan sampah. Inovasi seperti maggot dan RDF tidak hanya mengurangi beban sampah di TPA, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Untuk mendukung peningkatan inisiatif, pemerintah daerah perlu menyediakan pelatihan inovatif, insentif bagi KSM berprestasi, serta membentuk jaringan kolaboratif lintas sektor. Mengacu pada Teori Inovasi

Disruptif, KSM yang mampu melihat potensi dari limbah sebagai sumber daya bernilai memiliki peluang besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi sirkular yang adaptif dan berdaya saing di masa depan.

3.2. Upaya yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup untuk Mengoptimalkan Kinerja Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja KSM di Kabupaten Banyumas, ditemukan berbagai kendala pada setiap dimensi, mulai dari kuantitas pengelolaan yang belum merata, kualitas produk daur ulang yang masih rendah, lemahnya kerja sama lintas pihak, rendahnya akuntabilitas pelaporan, hingga kurangnya inovasi. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah optimalisasi yang mencakup peningkatan fasilitas dan armada operasional, pelatihan teknis dan manajerial secara rutin, pembentukan forum koordinasi antar-KSM dan dengan pemerintah daerah, penegakan kewajiban pelaporan keuangan dan kegiatan secara transparan, serta pemberian insentif bagi KSM yang inovatif. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kinerja KSM dalam mendukung implementasi ekonomi sirkular di Kabupaten Banyumas.

a. Upaya dalam Mengatasi Kendala Kuantitas

Berdasarkan hasil evaluasi, rendahnya kuantitas pengelolaan sampah oleh KSM di Kabupaten Banyumas disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, kurangnya keterampilan tenaga kerja, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, upaya strategis yang perlu dilakukan meliputi penyediaan tambahan alat pemilah otomatis dan kendaraan pengangkut sampah, pelatihan rutin untuk meningkatkan kapasitas SDM KSM, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah dari rumah. Jika dijalankan secara konsisten, langkah-langkah ini diyakini mampu meningkatkan volume sampah yang dikelola secara efektif serta memperkuat peran KSM dalam mendukung ekonomi sirkular di Kabupaten Banyumas.

b. Upaya dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sampah

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah oleh KSM di Kabupaten Banyumas, diperlukan serangkaian langkah strategis yang berkelanjutan dan terstruktur. Langkah pertama adalah menyelenggarakan pelatihan teknis secara rutin yang melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan praktisi ahli agar anggota KSM mampu menguasai teknologi terbaru seperti pirolisis, RDF, dan budidaya maggot. Langkah ini terbukti mampu meningkatkan mutu produk daur ulang dan memberikan nilai tambah ekonomi. Selanjutnya, perlu penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seragam dan wajib diberlakukan di seluruh KSM, disertai dengan pengawasan dan evaluasi berkala dari Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan setiap proses pemilahan, pengolahan, hingga distribusi produk berjalan sesuai standar. Selain itu, DLH juga perlu menjembatani kerja sama KSM dengan pihak swasta dan industri guna mendukung transfer teknologi serta membuka akses pasar yang lebih luas. Bentuk dukungan lain yang tak kalah penting adalah pemberian insentif kepada KSM yang secara konsisten mampu menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pengelolaan sampah, baik berupa bantuan alat, modal, maupun pelatihan lanjutan. Dengan pelaksanaan upaya-upaya tersebut secara optimal, diharapkan kualitas pengelolaan sampah oleh KSM dapat meningkat secara menyeluruh, mendukung penguatan ekonomi sirkular, dan menciptakan dampak positif bagi lingkungan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyumas.

c. Upaya dalam Memperkuat Kerjasama Antar Stakeholder

Untuk mengatasi minimnya koordinasi dan komunikasi antar-KSM serta dengan pihak terkait seperti DLH, UPKP, dan TPA BLE, diperlukan strategi penguatan kerja sama yang terstruktur dan berkelanjutan. Pertama, Pemerintah Kabupaten Banyumas

melalui DLH perlu membentuk forum komunikasi rutin yang melibatkan seluruh stakeholder pengelolaan sampah sebagai wadah diskusi, pemecahan masalah, dan evaluasi bersama. Kedua, perlu disusun mekanisme formal dalam bentuk regulasi atau surat edaran yang mewajibkan pelaporan kegiatan, komunikasi berkala, serta pembagian peran antar pihak terkait agar proses kerja lebih tertib dan transparan. Ketiga, DLH juga perlu membentuk tim evaluasi khusus untuk memantau efektivitas kerja sama di lapangan dan menyampaikan hasil evaluasi secara terbuka guna mendorong akuntabilitas dan komitmen bersama. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antarstakeholder, sehingga pengelolaan sampah oleh KSM berjalan lebih optimal dan mendukung pencapaian tujuan ekonomi sirkular di Kabupaten Banyumas.

d. Upaya dalam Meningkatkan Tanggung Jawab dan Transparansi

Tanggung jawab dan transparansi merupakan elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola pengelolaan sampah yang akuntabel dan efektif di tingkat komunitas. Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat sejumlah KSM di Kabupaten Banyumas yang belum optimal dalam memenuhi kewajiban pelaporan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas No. 24 Tahun 2023. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan berupa peningkatan mekanisme pengawasan dan evaluasi rutin terhadap pelaporan KSM secara triwulanan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sebagai bentuk penegakan akuntabilitas institusional. Selanjutnya, pemberian insentif berbasis kinerja seperti penghargaan, bantuan fasilitas, atau prioritas program pembinaan kepada KSM yang konsisten menjalankan pelaporan dengan tepat waktu dapat mendorong kepatuhan dan motivasi positif. Selain itu, pembangunan sistem transparansi publik berbasis digital juga menjadi solusi untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengawasan, dengan menyediakan akses terhadap laporan operasional dan keuangan KSM secara terbuka dan real-time. Implementasi terpadu dari ketiga upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan tanggung jawab dan transparansi KSM secara signifikan, sehingga mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang selaras dengan prinsip ekonomi sirkular. Wilson *et al.* (2017) juga menekankan bahwa formalisasi sektor informal ke dalam sistem pengelolaan sampah perlu didukung oleh kebijakan inklusif dan peran aktif pemerintah daerah.

e. Upaya dalam Mendorong Inisiatif dan Inovasi KSM

Inisiatif dan inovasi merupakan fondasi penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah serta memperkuat implementasi ekonomi sirkular di Kabupaten Banyumas. Guna mengatasi kesenjangan tingkat inovasi antar-KSM, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) perlu menyelenggarakan kompetisi inovasi secara berkala sebagai sarana pemicu kreativitas dan penghargaan terhadap KSM berprestasi. Selain itu, dukungan berupa bantuan peralatan, dana hibah, dan pelatihan kewirausahaan harus diberikan kepada KSM yang menunjukkan potensi pengembangan produk daur ulang bernilai ekonomi tinggi. Pelatihan tersebut mencakup aspek manajemen usaha, pemasaran, branding, dan pengelolaan keuangan agar inovasi dapat berkelanjutan dan layak secara komersial. Di sisi lain, kolaborasi dengan perguruan tinggi, sektor swasta, dan lembaga penelitian juga perlu difasilitasi untuk mendukung transfer teknologi dan pengembangan inovasi teknis. Dengan strategi yang komprehensif dan pelaksanaan yang berkesinambungan, diharapkan kapasitas inovatif KSM akan meningkat, sehingga mampu menciptakan produk yang tidak hanya bernilai ekonomis tetapi juga berkontribusi terhadap kualitas lingkungan dan keberlanjutan pengelolaan sampah di tingkat lokal.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas masih menghadapi tantangan di berbagai dimensi, khususnya dalam hal kuantitas, kualitas, kerja sama, tanggung jawab, dan inisiatif. Beberapa KSM seperti Randu Makmur menunjukkan capaian yang tinggi, namun sebagian besar lainnya masih belum optimal dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Hal ini berbeda dengan temuan Aulia dkk. (2022) yang menyimpulkan bahwa KSM "Sae" di Purwokerto Wetan secara umum telah memenuhi indikator kelembagaan dan teknis sesuai SNI, sementara dalam penelitian ini ditemukan ketimpangan signifikan antar-KSM, baik dari segi fasilitas, sumber daya manusia, maupun dukungan masyarakat. Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh cakupan wilayah penelitian yang lebih luas serta pendekatan evaluatif yang digunakan lebih komprehensif.

Selain itu, hasil penelitian ini memperluas pemahaman dari studi Aidha & Ayu (2022) yang menemukan adanya hubungan antara kinerja KSM dengan kepuasan masyarakat, karena dalam penelitian ini dilakukan evaluasi secara sistematis terhadap lima dimensi kelembagaan yang memengaruhi kinerja KSM dalam mendukung ekonomi sirkular. Penelitian ini juga memperkuat temuan Putra dkk. (2022) bahwa masih lemahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Namun, penelitian ini menambahkan bahwa tantangan tersebut tidak hanya bersumber dari eksternal masyarakat, tetapi juga dari lemahnya koordinasi antar-KSM, tidak meratanya distribusi fasilitas dari pemerintah, serta kurangnya inovasi dalam pengembangan produk hasil daur ulang yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Berbeda dengan penelitian oleh Islami (2022) dan Asrul dkk. (2022) yang fokus pada ekonomi sirkular di kawasan pesisir atau berbasis komunitas tertentu seperti panti asuhan, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menekankan perlunya integrasi antara evaluasi kinerja kelembagaan masyarakat dan strategi ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah skala kabupaten. Dengan menempatkan KSM sebagai aktor utama dalam tata kelola limbah rumah tangga, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi sirkular sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, sistem insentif, dan keberlanjutan kerja sama lintas stakeholder. Dengan demikian, temuan ini tidak hanya memperkuat hasil studi sebelumnya, tetapi juga memperluas ruang diskusi bahwa penguatan kelembagaan lokal berbasis evaluasi multidimensi menjadi kunci dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang partisipatif, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi tinggi di tingkat daerah.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan bahwa salah satu faktor pendukung penting dalam pengelolaan sampah oleh KSM di Kabupaten Banyumas adalah kekuatan struktur kerja internal yang dibangun secara informal namun efektif. Beberapa KSM seperti Randu Makmur dan Teluk menunjukkan pembagian tugas yang jelas, budaya kerja kolektif, serta adanya edukasi langsung dari ketua kepada anggota yang mampu meningkatkan disiplin dan tanggung jawab kerja. Dukungan tambahan berupa jaminan sosial sederhana seperti BPJS dan konsumsi harian juga menjadi pemantik loyalitas kerja yang berdampak pada kelancaran proses pengelolaan sampah. Selain itu, pelatihan rutin dari DLH serta keterlibatan masyarakat dalam pemilahan sampah sejak dari rumah turut memperkuat performa KSM tertentu dalam memenuhi indikator kuantitas dan kualitas pengelolaan.

Di sisi lain, terdapat pula faktor penghambat yang cukup signifikan dan konsisten muncul dalam berbagai unit KSM, yakni keterbatasan fasilitas, armada pengangkut, serta minimnya koordinasi antarpemangku kepentingan. Banyak KSM belum memiliki peralatan pengolahan yang memadai dan masih bergantung pada metode manual, yang berimplikasi pada rendahnya produktivitas dan mutu hasil olahan. Hambatan lainnya adalah kurangnya inisiatif dalam

menjalin kerja sama dengan pihak ketiga seperti sektor swasta, akademisi, maupun lembaga donor. Sebagian besar KSM masih pasif dan sangat bergantung pada intervensi pemerintah daerah, padahal potensi ekonomi dari hasil daur ulang seperti RDF, kompos, dan maggot sangat tinggi jika diiringi dengan strategi pengembangan produk dan jejaring pemasaran yang kuat. Hal ini sejalan dengan Andreasen & Møller-Jensen (2016) yang menyoroti pentingnya layanan swadaya masyarakat dalam memperluas akses pengelolaan lingkungan di kawasan pinggiran kota. Temuan ini mengindikasikan perlunya pembinaan kewirausahaan dan pembentukan forum kolaboratif sebagai upaya mendorong KSM menjadi lebih mandiri, adaptif, dan inovatif dalam mendukung ekonomi sirkular.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas, ditemukan bahwa pelaksanaan kinerja KSM masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari ketidakseimbangan pencapaian antar-KSM dalam lima dimensi evaluasi yang digunakan, yaitu kuantitas, kualitas, kerja sama, tanggung jawab, dan inisiatif. Beberapa KSM seperti Randu Makmur telah menunjukkan kinerja yang efektif dalam hal volume pengelolaan, mutu produk hasil daur ulang, hingga keterlibatan masyarakat, namun sebagian besar lainnya masih menghadapi kendala teknis dan manajerial yang cukup kompleks. Hambatan seperti keterbatasan alat, minimnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya pelaporan rutin menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat masih memerlukan penguatan dari berbagai sisi, baik internal kelembagaan maupun dukungan eksternal pemerintah daerah.

Terkait dengan upaya penguatan ekonomi sirkular melalui peran KSM, penelitian ini menunjukkan bahwa potensi kontribusi KSM dalam mendukung ekonomi sirkular sangat besar apabila kinerja kelembagaan mereka dioptimalkan. Untuk itu, perlu dilakukan langkah strategis seperti peningkatan kapasitas teknis dan manajerial melalui pelatihan, penyediaan sarana prasarana yang merata, pembentukan forum koordinasi lintas-KSM, serta pemberian insentif berbasis kinerja untuk mendorong inovasi dan tanggung jawab. Dengan demikian, KSM tidak hanya menjadi pelaksana teknis pengelolaan sampah, tetapi juga aktor penting dalam menciptakan nilai ekonomi baru dari limbah yang dikelola, sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular yang berkelanjutan dan inklusif.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini terbatas pada evaluasi kinerja KSM di Kabupaten Banyumas dengan lima dimensi utama, yakni kuantitas, kualitas, kerja sama, tanggung jawab, dan inisiatif. Ruang lingkupnya belum mencakup wilayah lain yang memiliki karakteristik kelembagaan berbeda. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dalam periode terbatas (6–25 Januari 2025) dan bergantung pada metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga belum merepresentasikan dinamika jangka panjang. Variasi kondisi antar-KSM juga menjadi kendala dalam menarik generalisasi yang lebih luas.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah kajian dan mengintegrasikan pendekatan kuantitatif guna memperkuat analisis hubungan antara variabel. Fokus baru juga dapat diarahkan pada efektivitas kolaborasi multipihak dan penerapan kewirausahaan sosial dalam pengelolaan sampah. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, penelitian ke depan diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan sistem ekonomi sirkular yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas atas dukungan, izin, dan kerja sama yang telah diberikan selama proses pelaksanaan

penelitian ini. Penulis juga mengapresiasi seluruh informan, baik dari pihak aparaturnya dinas, pengelola UPKP, maupun pengurus dan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi, wawasan, dan data yang relevan dalam penyusunan penelitian ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan efektivitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta mendukung penguatan ekonomi sirkular yang berkelanjutan di Kabupaten Banyumas.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abou Taleb, M., & Al Farooque, O. (2021). Towards a circular economy for sustainable development: An application of full cost accounting to municipal waste recyclables. *Journal of Cleaner Production*, 280, 124047. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124047>
- Aidha, Z., & Ayu, D. (2022). Kontribusi Kinerja Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan Kepuasan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 4(2), 594-605. 10.31539/joting.v4i2.4250
- Andrade Guerra, J. B. S. O. de, Ribeiro, J. M. P., Fernandez, F., Bailey, C., Barbosa, S. B., & Neiva, S. da S. (2016). The adoption of strategies for sustainable cities: A comparative study between Newcastle and Florianópolis focused on urban mobility. *Journal of Cleaner Production*, 113, 681–694. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.07.135>
- Andreasen, M. H., & Møller-Jensen, L. (2016). Beyond the networks: Self-help services and post-settlement network extensions in the periphery of Dar es Salaam. *Habitat International*, 53, 135–142. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.11.003>
- Asrul, A., Ramadhani, I. A., & Indriyani, N. (2023). Implementasi Ekonomi Sirkular dengan Pengelolaan Sampah Menjadi Produk Kreatif di Panti Asuhan Muhammadiyah Kabupaten Sorong. *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 21-24. <https://doi.org/10.36232/JURNALABDIMASA.V6I2.3805>
- Aulia, N. D., Widiyanto, A. F., Kuswanto, S., & Yuniarno, S. (2022). Evaluasi Pengelolaan Sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kelompok Swadaya Masyarakat 'Sae' Kelurahan Purwokerto Wetan Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Kesmas Indonesia*, 14(2). <https://repository.unsoed.ac.id/14375/>
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Sumedang: IPDN.
- Islami, P. Y. N. (2022, December). Penerapan Ekonomi Sirkular Pada Pengelolaan Sampah Pesisir: Studi Kasus Pengelolaan Sampah Pulau Pasaran Bandar Lampung. In *The 4th International Conference on University Community Engagement (ICON-UCE 2022)* (Vol. 4, pp. 512-520). <https://icon-uce.com/index.php/icon-uce/article/view/71>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN)*. <https://sipsn.menlhk.go.id/>
- Kumar, R. (2011). *Research Methodology a step-by-step guide for beginners* (3rd ed.). SAGE.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). *Modul Perkuliahan Metodologi Penelitian Sosial*. Sumedang: Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.
- Putra, A. D., Wiryono, W., Budiyanto, B., Susatya, A., & Uker, D. (2022). Evaluasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Tengah. *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 11(1), 1-11. <https://ejournal.unib.ac.id/naturalis/article/view/21159>
- Simangunsong, F. (2019). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wilson, D. C., Velis, C., Rodic, L., Modak, P., Soos, R., Simonett, O., & Aparcana, S. (2017). Approaches to formalization of the informal waste sector into municipal solid waste management systems in low- and middle-income countries: Review of barriers and success factors. *Waste Management*, 61, 593–607. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.12.028>

